

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN *URBAN FARMING*

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN DEVELOPMENT URBAN FARMING

Dzulhijjah Dwi Yanti^{1*}, Ertien Rining Nawangsari²

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

*Koresponden email: dzulhijjahdwiYanti05@gmail.com

ABSTRAK

Ketersediaan lahan pertanian pada saat ini semakin menurun oleh pertumbuhan pembangunan gedung perkotaan, sehingga berakibat bagi berkurangnya lahan pertanian untuk bercocok tanam dan kemungkinan juga berdampak pada kelangsungan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut harusnya menjadi nafas dari pola kebijakan oleh pemerintah daerah dan perkotaan untuk membangkitkan pertanian pada kawasan kota (*Urban Agriculture*), salah satu solusi alternatif yang mudah penerapannya adalah *urban farming*. Penelitian ini dilakukan di salah satu kampung di Surabaya yakni kampung songo Surabaya. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di Kampung songo Surabaya dikarenakan kampung songo Surabaya menjadi percontohan *urban farming* di Kota Surabaya karena sukses menerapkan *urban farming* di wilayahnya, dengan mengubah lahan sempit menjadi lahan produktif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. pengambilan data diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interaktif dengan tahapan; pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah menurut Rosmaladewi (2018) dalam (Anggraini, 2021) yang terdiri atas 3 (tiga) peran yaitu peran sebagai regulator, fasilitator, dinamisator. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya telah menjalankan peran dengan cukup baik dalam Pengembangan *Urban Farming* di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya.

Kata kunci: Pengembangan; pemerintah daerah; pertanian perkotaan

ABSTRACT

The availability of agricultural land is currently decreasing due to the growth of urban building development, resulting in reduced agricultural land for growing crops and possibly also having an impact on environmental sustainability. This problem should be the inspiration for policy patterns by regional and urban governments to revive agriculture in urban areas (Urban Agriculture). One alternative solution that is easy to implement is urban farming. This research was conducted in one of the villages in Surabaya, namely Songo Village, Surabaya. Therefore, researchers are interested in conducting research in Kampung Songo Surabaya because Kampung Songo Surabaya is a model for urban farming in the city of Surabaya because it has successfully implemented urban farming in its area, by converting narrow land into productive land. This type of research is descriptive qualitative. Data collection was obtained from observation, documentation, and interviews with related informants. The data analysis technique used in this research is interactive with stages; data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing. This research uses the theory of the role of government according to Rosmaladewi (2018) in (Anggraini, 2021) which consists of 3 (three) roles, namely the role of regulator, facilitator, dynamist. The results show that the role of the Surabaya Food Security and Agriculture Service has carried out its role quite well in the development of Urban Farming in the Kampung Songo District Sukomanunggal Surabaya.

Keywords: Development; local government; urban farming

PENDAHULUAN

Pada awalnya tren ketahanan pangan yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh peran Perum BULOG sebagai penyedia dan mengatur kebutuhan bahan pangan masyarakat. Peran Perum BULOG diperluas untuk mengontrol beberapa komoditas lain seperti gula, tepung, daging, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, serta telur dan ayam khususnya pada saat Idul Mubarak dan Natal. Namun sejak krisis Indonesia tahun 1998, peran tersebut telah berubah total akibat tekanan internasional untuk meliberalisasi perekonomian Indonesia. Sejak itu, Perum BULOG kembali mengontrol beras saja (Panuju, Mizuno, and Trisasongko 2013).

Berkaitan dengan ketahanan pangan, akses ekonomi memiliki peran dalam peningkatan ketahanan pangan. Tingginya tingkat urbanisasi dapat menciptakan kelompok masyarakat miskin di perkotaan yang dapat mengakibatkan adanya perbedaan akses terhadap pangan setiap rumah tangga dan turut menjadi penyebab timbulnya masalah ketahanan pangan perkotaan. Masalah ketersediaan pangan dan akses pangan penduduk perkotaan akibat dari urbanisasi yang tinggi di perkotaan menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata, tingkat kemiskinan yang cenderung meningkat dan menurunnya ketersediaan lahan produktif (Adriani, Andrias dan Anggrayni, 2015). Kota

Surabaya sebagai kota besar dan banyaknya penduduk tak mungkin mengelak dari persoalan urbanisasi yang terus meningkat pesat. Arus urbanisasi yang terus tumbuh menimbulkan sebuah dampak seperti pengangguran, kemiskinan, kurang gizi, kriminalitas, kepadatan penduduk, timbulnya bangunan liar, kurangnya lapangan pekerjaan dan yang tak terkecuali yaitu meningkatnya jumlah kebutuhan dan naiknya harga bahan makanan pokok. (Junainah, et al. 2016: 149). Berkurangnya kebutuhan bahan pangan tersebut sebagian besar dialami oleh masyarakat yang berpenghasilan kurang, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketersediaan lahan pertanian pada saat ini semakin menurun oleh pertumbuhan pembangunan gedung perkotaan, sehingga berakibat bagi berkurangnya lahan pertanian untuk bercocok tanam dan kemungkinan juga berdampak pada kelangsungan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut harusnya menjadi nafas dari pola kebijakan oleh pemerintah daerah dan perkotaan untuk membangkitkan pertanian pada kawasan kota (*urban agriculture*) (Mochtar dan Widodo, 2021). Peran strategis sektor pertanian dalam membantu pembangunan perekonomian nasional berupa berbagai bidang seperti perkebunan, perhutanan, perikanan. Sebanyak 31.9% lapangan pekerjaan dari total angkatan kerja di Indonesia (2016) diakibatkan oleh sektor pertanian secara strategis sehingga dapat memperoleh prosentase sebesar 13,38% dalam GNP Indonesia (2014). (Khoirunnas 2019). Namun saat ini masih rendahnya pola perilaku masyarakat perkotaan yang memanfaatkan budaya pertanian seperti di pedesaan menjadikan hal tersebut suatu permasalahan baru yang ditemukan di perkotaan dikarenakan banyak perilaku masyarakat yang konsumerisme dari pada menjadi produsen akan pemenuhan kebutuhan barang pokok.

Salah satu solusi alternatif yang mudah penerapannya adalah *urban farming*. Pada saat ini telah terdapat beberapa kegiatan *urban farming*, akan tetapi kegiatan *urban farming* tersebut belum sepenuhnya merata dilakukan oleh semua warga dan belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat setempat akan gerakan *urban farming* ini. Tantangan dalam ketersediaan pangan di Kota Surabaya adalah lahan pertanian yang dari tahun ke tahun semakin menyusut, situasi produksi pangan yang ada di Kota Surabaya cukup beragam dan cenderung mengalami penurunan.

Urban farming dapat meningkatkan ketahanan pangan melalui perbaikan ketersediaan dan mengurangi pengeluaran pangan rumah tangga. (Kurniasih, 2015). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai organisasi perangkat daerah yang menjadi ujung tombak urusan pertanian.

(Nugrohowati & Prathama, 2022). Diperlihatkan berdasarkan tugas, fungsi dan kedudukannya yang dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. (Naziyah & Arif, 2023). Pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun program urban farming yang berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dimana implementasi program *urban farming* ini nantinya akan mewujudkan pembangunan Kota Surabaya yang berkelanjutan, berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang.

Penelitian ini dilakukan disalah satu kampung di Surabaya yakni kampung songo Surabaya, alasan peneliti melakukan penelitian di Kampung songo Surabaya dikarenakan, bahwa di kampung songo Surabaya menjadi percontohan *urban farming* di Kota Surabaya karena sukses menerapkan *urban farming* di wilayahnya, dengan mengubah lahan sempit menjadi lahan produktif. Adanya program *urban farming* ini, membuat Kampung Songo yang dulunya lingkungan kotor, dan banyak sampah menumpuk, sekarang juga menjadi lingkungan yang bersih, hijau, dan asri.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode deskriptif-kualitatif bertujuan untuk memberi gambaran secara mendalam dan komprehensif dalam kajian pada penelitian. Berdasarkan (Anggito & Setiawan, 2018) Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan hasil pada penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan masyarakat setempat. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen, laporan dan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif (*interactif model of analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merupakan uraian data mengenai peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Pengembangan *Urban Farming* di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Kota

Surabaya yang merupakan suatu penjabaran dari hasil penemuan pada lokasi penelitian berdasarkan pengamatan penulis yang berkaitan dengan fenomena sesuai dengan fokus penelitian. Terdiri dari 3 variabel peran pemerintah yang mengacu pada fokus penelitian menurut Rosmaladewi (2018) dalam (Anggraini, 2021), yakni: Peran Pemerintah sebagai regulator, Peran Pemerintah sebagai fasilitator, dan Peran Pemerintah sebagai dinamisator.

Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebagai regulator adalah Pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan regulasi. Sebagai regulator pemerintah memberikan acuan dan pedoman dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator dapat dilihat dari pelaksanaan penyusunan kebijakan pengembangan pertanian perkotaan atau *urban farming* di Kampung Songo Kota Surabaya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) berperan dalam menggerakkan dan mendukung berbagai aspek kegiatan *urban farming* di Kota Surabaya antara lain: Pengembangan Kebijakan: DKPP dapat berperan dalam merumuskan kebijakan dan pedoman terkait *urban farming* di Kota Surabaya. Ini termasuk mengatur izin, regulasi, dan panduan teknis yang memungkinkan warga kota untuk melakukan kegiatan pertanian di lingkungan perkotaan, kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dapat membantu dalam mengidentifikasi lokasi yang cocok dan pengelolaan lahan kosong atau terlantar menjadi lahan pertanian yang produktif untuk kegiatan *urban farming* di Kota Surabaya.

Pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyusun *urban farming* berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Lahan pertanian yang dari tahun ke tahun semakin menyusut, situasi produksi pangan yang ada di Kota Surabaya cukup beragam dan cenderung mengalami penurunan. Ketersediaan cadangan pangan utama baik beras maupun setara beras cukup penting dalam meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pengelolaan cadangan pangan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Ketersediaan Pangan Produktivitas & Nilai Produksi Komoditas Pangan Utama

| Capaian Produktivitas, Luas, Produksi Tanaman Pangan | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|
| Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Produktivitas (Ton/Ha) | | | | |
| Padi | 5,44 | 5,53 | 6,49 | 6,51 |
| Jagung | 4,88 | 3,38 | 3,37 | 3,3 |
| Luas Lahan Tanaman Pangan (Ha) | | | | |
| Padi | 1.844 | 1.750 | 1.854,90 | 1.242,80 |
| Jagung | 82 | 32,5 | 68,3 | 49,2 |
| Produksi (Ton) | | | | |
| Padi | 10.130,64 | 9.685,21 | 12.042,85 | 8.082,50 |
| Jagung | 400,49 | 109,88 | 230,35 | 162,22 |

Sumber: DKPP Kota Surabaya, 2022

Urban Farming ini selain menciptakan lahan terbuka hijau, manfaat lain dari yakni dapat meningkatkan kreativitas dan memberdayakan anggota masyarakat, mengurangi sampah-sampah organik dan limbah dapur rumah tangga dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai pupuk organik, mengurangi polusi udara dan suara Gas karbon dioksida (CO₂) yang mencemari udara akan diserap oleh tanaman yang diubah menjadi oksigen (O₂) melalui fotosintesis, menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan, diskusi dan penyusunan program. Selain itu, dapat digunakan sebagai wadah belajar dan penyediaan buah serta bibit tanaman yang berkualitas untuk kebutuhan pasar lokal, maupun regional. Selama ini tercatat, di Kota Surabaya program *urban farming* sudah tersebar di 26 kecamatan termasuk salah satunya Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal.

Selain, memberikan regulasi terkait *urban farming* Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya juga memiliki daftar jenis tanaman yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk ditanam dalam skala *urban farming*. Hal ini dapat berkaitan dengan faktor seperti ukuran tanaman, risiko invasif, dan dampak terhadap lingkungan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) juga memiliki regulasi yang mengatur aspek kesehatan dan keamanan dalam *urban farming*, seperti perlindungan terhadap penyakit tanaman, penggunaan bahan aman, dan pengelolaan risiko lainnya.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebagai fasilitator adalah Pemerintah menyiapkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam optimalisasi program. Sebagai fasilitator, pemerintah juga berperan dalam memberikan bantuan melalui pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, dan pemberian

dana atau permodalan agar masyarakat dapat bertahan dan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan (Rosmaladewi, 2018).

Peran Pemerintah sebagai fasilitator dapat dilihat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya memberikan pelatihan dan menyediakan sarana prasarana pembangunan untuk perkembangan pelaksanaan *urban farming* di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Berdasarkan dari hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa fasilitas tambahan diperoleh dari sektor perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dalam bentuk bantuan, perusahaan menyediakan pupuk dan bibit tanaman yang digunakan oleh kelompok sasaran dalam kegiatan bercocok tanam.

Fasilitas lainnya diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya melalui alokasi anggaran mereka. Ini mencakup fasilitas seperti *polybag* atau karung, sebagian pot atau media tanam, pupuk, bibit-bibit tanaman, instalasi hidroponik, serta penyediaan peralatan untuk bertani. disamping itu, masyarakat sebagai kelompok sasaran juga menyediakan fasilitas-fasilitas sendiri dengan menggunakan limbah atau barang tak terpakai. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan *urban farming*, membantu masyarakat perkotaan khususnya di kampung Songo Surabaya menjadi lebih mandiri secara pangan, dan meningkatkan ketahanan pangan pada wilayah perkotaan.



Gambar 1. Panen hasil *Urban Farming*

Pada dasarnya, peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu penyedia fasilitas layanan bagi masyarakat. Peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya sebagai fasilitator adalah menciptakan perkembangan yang baik bagi pelaksanaan *urban farming* untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan pengembangan *urban farming* di Kota Surabaya. Sebagai fasilitator, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surab

baya bergerak dibidang pendamping melalui sosialisasi, pembinaan dan memfasilitasi pendanaan serta sarana dan prasarana yang diperlukan.

Sebagai fasilitator, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya memiliki peran kunci dalam mendorong, mendukung, dan memfasilitasi berbagai kegiatan terkait pertanian dan pangan di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Peran penting lainnya yang dimainkan oleh DKPP sebagai fasilitator yaitu pendampingan teknis, pelatihan dan edukasi, fasilitasi akses ke sumber daya, penghubung dengan sumber daya eksternal, koordinasi kolaborasi, pengembangan Jaringan: memfasilitasi pembentukan jaringan komunitas petani dan pelaku pertanian, baik dalam skala lokal maupun regional, penyediaan informasi, promosi inovasi, advokasi dan kebijakan.

Dengan memainkan peran sebagai fasilitator, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya dapat memperkuat sektor pertanian dan pangan di wilayahnya, memajukan praktik berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku *urban farming* di perkotaan dan pelaku pertanian lokal. Ketersediaan fasilitas dan peralatan dalam pelaksanaan program *urban farming* di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ini cukup memadai dan berpengaruh untuk operasionalisasi pelaksanaan *urban farming*.

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator

Berdasarkan Rosmaladewi (2018), peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebagai dinamisator adalah Pemerintah menggerakkan partisipasi berbagai pihak, baik individu maupun lembaga untuk mendorong dan memelihara dinamika program pemerintah. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan dengan memberikan pembinaan dan pengarahannya yang intensif dan efektif kepada masyarakat, yang diwujudkan melalui tim penyuluh dan instansi tertentu untuk memberikan pelatihan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya sebagai dinamisator yang berperan untuk memberikan bimbingan dan arahan yang intensif dan efektif pada masyarakat dalam pengembangan *urban farming* di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya. Secara keseluruhan, melalui kombinasi evaluasi yang baik, apresiasi terhadap hasil, peran aktif Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian (DKPP) dan masyarakat Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dan dalam partisipasi lapangan, dan upaya sosialisasi yang efektif, program pengembangan memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan dan dampak yang lebih luas

dalam masyarakat. Berperan memberikan bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat atau kelompok tani *urban farming*. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dengan cara berkoordinasi dengan warga yang melakukan kegiatan *urban farming*.



Gambar 2. Bimbingan Budidaya Tanaman *Urban Farming*

Pemerintah daerah melalui DKPP Surabaya berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan pemberdayaan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya di Kampung Songo dengan tujuan meningkatkan kualitas *urban farming*, melalui monitoring dan evaluasi rutin pelaksanaan pertanian perkotaan atau *urban farming* di Kampung Songo Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya dapat mencapai hasil yang optimal jika ada kolaborasi, komunikasi antara masyarakat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, sebab tanpa adanya kolaborasi dan komunikasi yang sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya dan warga kampung Songo Kota Surabaya maka program *urban farming* ini dapat berjalan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi *urban farming* di kampung Songo Surabaya yang terstruktur dan terkoordinasi adalah kunci untuk memastikan bahwa program tersebut efektif, berkelanjutan, dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat perkotaan dalam mendukung ketahanan pangan.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam pengembangan *urban farming* di Kampung Songo dilihat pada tugas dan fungsi dinas yang mana 3 (tiga) peran yang ada yaitu peran regulator, fasilitator dan dinamisator telah dilaksanakan de-

ngan cukup baik. Namun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya perlu melaporkan perkembangan program *urban farming* di Kampung Songo Kota Surabaya dengan menyajikan data pencapaian yang akurat. Hal ini penting agar dapat mengukur sejauh mana program telah berjalan dan mencapai tujuan yang ditetapkan setelah diberlakukannya kebijakan *urban farming*. Laporan ini akan membantu dalam mengevaluasi hasil program dan mengambil keputusan terkait kelanjutan program dimasa mendatang, untuk menjaga komunikasi yang lancar antara para pelaksana dan perencana program, serta untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman dan komunikasi yang kurang efektif diantara berbagai bagian organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Rohayatin dan Azizi, (2019). “Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pelestarian Kesenian Wayang Golek di Kabupaten Bandung Barat”. *Jurnal Caraka Prabhu*. 3(1).
- Afrida, R., & Nawangsari, E. R. (2022). Peran Dinas Perdagangan dan Industri dalam Upaya Membangun Eks-PKL Alun-Alun Kabupaten Jombang. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 20(1).
- Amelia & Nawangsari, (2021). Implementasi Program *Urban Farming* sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Governansi*, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138. 7(2).
- Amir, H. M., & Saidin. (2020). Pengembangan *Urban Farming* dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kendari. *Jurnal Neo Societal*, 5(3), 942–942. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95675-6_300092
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Andiani, R., Harsoyo, H., & Subejo, S. (2019). Motivasi Warga dalam Pelaksanaan Program Demplot *Urban Farming* Di Kawasan Kampung Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. *Agritech: Jurnal Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 20(2), 49.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. CV.Pustaka Setia. Anggraini, O. (2020). Program Edukasi *Urban Farming* Penunjang Kemandirian Masyarakat. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 20 (2), 129–136.
- Austin, T., & Marleni. (2021). Implementasi Program Kampung Iklim: *Urban Farming* Melalui Hidroponik Dan Budikdamber di

- Kelurahan Sialang Palembang. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(2), 26–32.
- Ayun, Q., Kurniawan, S., & Saputro, W. A. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian di Bagian Negara Agraris. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, 5(2), 38–44. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i2.3040>
- Baturangka, T., Kaawoan, J., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–9.
- Fazry, R. W. (2019). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(4), 358–375.
- Iswanti, S. I. S., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92-103.
- Lidia Lusiana. (2017). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Kasus DiSDN 011 dan SDN 013). *Jurnal Administrasi Negara*, 6(1), 6991–7005.
- Anggraini, D. M. (2021). Upaya pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2016-2019. *Jurnal JOM FISIP*, 8, 1-15.
- Naziyah, F. A., & Arif, L. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Masker. *Jurnal Kebijakan Publik (JKP)*, 14(1).
- Nugrohowati, R. H., & Prathama, A. (2022). Peran Dainas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam Meningkatkan Produksi Padi. *Jurnal Kebijakan Publik (JKP)*, 13(2).
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd Ed). SAGE Publications.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, (2002).
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, (2021). https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf.
- Kumparan.com. (2021). Melihat Kampung Songo, Percontohan *Urban Farming* di Surabaya. Kumparan.Com.
- Salam, M. D., & Prathama, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 137-143.
- Suarasurabaya.net. (2021). Kembangkan Ketahanan Pangan, Kampung Songo Simomulyo Panen Perdana dari *Urban Farming*. Suarasurabaya.Net. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/kembangkan-ketahanan-pangan-kampung-songo-simomulyo-panen-perdana-dari-urban-farming/>.